

Paradigma Baru Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0

Author:

Riska Armianti¹
Reh Bungana²
Deny Setiawan³

Affiliation:

Universitas Negeri
Medan^{1,2,3}

Corresponding email

riska.armt25@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-09-02
Accepted: 2024-09-09
Published: 2024-09-13



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Paradigma baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar sangat penting dalam membentuk karakter siswa di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan dan metode inovatif dalam pembelajaran PKn dapat menciptakan siswa yang berintegritas, beretika, dan memiliki kecakapan digital yang memadai. Melalui studi literatur dan analisis data empiris dari beberapa sekolah dasar di Indonesia, ditemukan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media digital interaktif, dan aplikasi pendidikan berbasis internet menjadi alat penting dalam proses ini. Pendekatan yang menekankan kolaborasi, diskusi kritis, dan refleksi diri juga terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan etika digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi paradigma baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, pembelajaran PKn di sekolah dasar tidak hanya mampu membentuk karakter siswa yang baik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab di era digital. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan di sekolah dasar, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era digital.

Kata kunci: PKn, Pembentukan Karakter, Era Revolusi Industri 4.0

Pendahuluan

Penelitian ini lahir dari isu hangat mengenai pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan yang kesatuannya terintegrasi dalam suatu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Menurut Pertiwi dkk., (2021) Isu ini berkembang luas karena adanya keterkaitan antara implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, hingga saat ini isu tersebut menjadi suatu paradigma baru atau kerangka pikir yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan konseptual baru pada mapel PKn. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Kamaliah, L., Al Sadad, D., & AS, N. N, 2023).

Pendidikan adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sadar dan berorientasi pada tujuan untuk mengembangkan potensi individu, sehingga mereka menjadi dewasa dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan agar individu dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia secara keseluruhan (Winataputra, 2016). Sedangkan pada pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tujuan utamanya adalah untuk membina kedewasaan masyarakat atau warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam

konteks negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. PKn di Indonesia sangat erat kaitannya dengan empat pilar demokrasi Indonesia, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Budiutomo, 2013).

Pendidikan Kewarganegaraan sesjatinnya sudah diajarkan sejak kelas satu SD. Pada usia ini, anak-anak berada pada tahap perkembangan akhir kanak-kanak, di mana mereka sudah mampu berpikir kritis dan menghargai nilai-nilai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan, yang menjadi landasan pertimbangan moral (Purwanti & Haryanto, 2015). Oleh sebab itu pendidikan PKn merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa yang harus ditamkan sejak dini. Bentuk signifikansi dari pembelajaran PKn dalam membentuk karakter siswa. Dalam hal ini pembentukan karakter dihasilkan dari pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa (Izma & Kesuma, 2019).

Menurut Anatasya & Dewi, (2021) Pendidikan karakter sangat penting karena mampu menjadikan peserta didik cerdas, berbudi pekerti, dan sopan santun, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang bermakna. Pendidikan karakter yang bermoral ini diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di setiap jenjang sekolah. Oleh sebab itu menurut Sofyan dan Riswandi dalam (Juwandi, 2020) mengatakan bahwa proses pembelajaran PKn yang dimaksud harus dinamis dan berkelanjutan, mengikuti perkembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Problem utama yang menjadi tantangan pembentukan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan adalah semakin berkembangnya era digitalisasi yang merubah pola pikir dan karakter peserta didik. Oleh sebab itu diperlukan sebuah inovasi dan paradigma baru dalam pembelajaran PKn di tingkat Sekolah Dasar agar pembelajaran PKn yang berkelanjutan serta mengikuti perkembangan berjalan sesuai dengan program yang dan hasil yang diharapkan.

Studi Literatur

Kajian yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Pkn Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar” menunjukkan hasil yaitu Pendidikan karakter menjadi salah satu hal yang penting dalam menciptakan generasi bangsa di Indonesia. Melalui pendidikan karakter peserta didik diajarkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketaqwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun. PKn merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik, karena tujuan PKn pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan melalui PKn dalam membentuk akhlak generasi muda (Fauziah, 2023).

Kajian yang berjudul “Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0” menunjukkan hasil yaitu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk terus dilaksanakan. Melihat keadaan Indonesia di era Revolusi Industri 4.0 yang rentan sekali tercampur budayanya oleh asing karena kemajuan internet, Pendidikan Kewarganegaraan harus hadir sebagai penyeimbang dan pemurni rasa kebangsaan dalam diri warga negara Indonesia. Jangan sampai masyarakat kehilangan identitas nasional seperti punahnya beberapa bahasa daerah. Pendidikan multikultural juga harus terus digemborkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Agar kita dapat saling menghargai, menerima dan mendorong satu sama lain menuju kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, pendidikan multikultural juga sangat penting bagi hubungan kita dengan bangsa lain, agar terjalin ikatan dan kerja sama yang dapat memajukan Indonesia. Generasi muda harus bisa menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman baik di masa kini atau nanti sesuai identitas

nasional. Hal ini juga harus didukung oleh kemajuan dalam pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik itu dari tenaga pendidik maupun fasilitas yang tersedia. Agar bangsa Indonesia tetap mempertahankan identitas nasional dalam diri masing-masing meskipun di era revolusi industri 4.0 atau sedang mempelajari budaya asing atau sedang mengenyam pendidikan di sana dan terbentuklah smart and good citizens yang menjadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan harus tetap bertahan, untuk mempertahankan keutuhan dari bangsa Indonesia yang telah dibangun bersama-sama. Apa pun tantangan zaman yang akan hadir harus bisa diatasi oleh seluruh bangsa Indonesia seperti revolusi industri 4.0. Maka pendidikan kewarganegaraan harus ikut beradaptasi dalam pelaksanaannya agar tidak lekang oleh zaman (Munawaroh & Dewi, 2021).

Kajian yang berjudul “Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0”, pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kendala seperti infrastruktur yang terbatas dan kebutuhan pengembangan profesional guru sebagai hambatan utama. Namun, integrasi kewarganegaraan digital berpotensi meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam praktik kewarganegaraan, baik secara lokal maupun global. Studi ini merekomendasikan kebijakan yang adaptif dan peningkatan investasi dalam pelatihan guru serta infrastruktur teknologi, sehingga pendidikan kewarganegaraan dapat lebih efektif menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan inovatif dalam pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi masyarakat yang terus berubah (Alinata, et all, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mencari sumber-sumber seperti artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait permasalahan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel, buku, dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, teknik simak, dan teknik catat. Teknik catat mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya untuk dijadikan kutipan (Febrita & Harni, 2020). Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk mendapatkan informasi relevan dideskripsikan secara ilmiah, dan diambil kesimpulan untuk penelitian.

Hasil

Sejarah Perkembangan kurikulum PKn

Kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pendidikan adalah menjadi satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Tujuan utama dari pelajaran PKn adalah untuk membentuk warga negara dalam memahami dan mampu menjalankan hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang sesuai dengan pokok amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Fahrurrozi dkk., 2022). Keterampilan yang dimaksud menurut (Septiana & Kurniawan, 2018) adalah hal yang meliputi kemampuan berpikir kritis serta kemampuan mengenal, memilih, dan memecahkan masalah sesuai dengan pembelajaran PKn di sekolah dasar. Dalam perjalanannya, pelajaran PKn sering berganti nama dan penyebutan sesuai dengan cita-cita dan target kebutuhan bangsa. Hal ini dipertegas melalui Sunarso, (2009) bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal digunakan sebagai sarana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Usaha ini terlihat dari munculnya berbagai nama untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan dinamika politik bangsa Indonesia.

Pada orde lama, Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya terkait PKn, muncul sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945, termasuk instruksi pembaruan buku-buku di perguruan tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan No. 122274/S

pada 10 Desember 1959, membentuk panitia beranggotakan 7 orang yang bertugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban dan hak warga negara Indonesia serta tujuan Revolusi Kemerdekaan. Setelah pemberontakan PKI, istilah Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara atas usul Menteri Kehakiman Mr. Suhardjo, dan berlaku hingga tahun 1968 (Supardo dkk dalam Sunarso, 2009). Sedangkan pada Orde Baru (kurikulum 1968), PKn termasuk dalam kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila baik di sekolah dasar maupun menengah. Bahan pengajaran PKn ini digunakan hingga munculnya Kurikulum 1975, yang mengubah namanya menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). PMP bertujuan membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dikenal secara konstitusional melalui TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN. Materi PMP didasarkan pada P4 sesuai Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Seiring perkembangan, PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum 1994, berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 ayat 2 (Sunarso, 2009; Safei, H., & Hudaidah, H. (2020).

Pada masa reformasi, Maka Kurikulum 1994 digantikan oleh Kurikulum 2004, yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada tahun 2004, kedudukan PKn pada kurikulum di SD diintegrasikan dengan IPS atau dikenal dengan PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial), dengan tiga komponen berkualitas seperti yang diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Karena KBK bersifat uji terbatas, kurikulum 2006 pun muncul. Dalam kurikulum ini, PKn di SD berdiri sendiri sebagai mata pelajaran PKn, dengan tujuan agar peserta didik dapat berpikir kritis, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratis, serta berinteraksi dengan bangsa lain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Raharjo, 2020).

Pada tahun 2013, pemerintah memperkenalkan Kurikulum 2013, yang mengubah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan ini bertujuan menyempurnakan pembelajaran dengan menekankan nilai dan moral Pancasila, yang sebelumnya kurang diperhatikan. Dari segi metodologi, pembelajaran PPKn berupaya mengembangkan ranah sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) secara optimal dan koheren. Materi mencakup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (Santoso dkk., 2015).

Menurut putra dalam Syafitri, & Safira F. D, (2024), mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar yang didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti, mengubah sebutan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Meski nama mata pelajaran berubah, muatan pendidikan kewarganegaraan tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam Pendidikan Pancasila. Kurikulum ini menekankan akselerasi pembelajaran, menghargai keberagaman sebagai esensi, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ketiga poin utama ini mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan membentuk siswa yang berkarakter dan berkompeten. Menurut Hartanto (2023) Tujuan pemerintah dalam memperbaiki kurikulum sangat terkait dengan pendidikan karakter dan pembentukan generasi muda yang memahami nilai-nilai nasional, terutama Pancasila. Hal ini penting untuk membangun fondasi bangsa yang kuat dan kompetitif. Dalam Kurikulum Merdeka, implementasi nilai-nilai karakter melalui Profil Pelajar Pancasila menjadi tantangan besar, terutama di era digital dengan perkembangan teknologi yang pesat pada era society 5.0. Generasi saat ini sering terjebak dalam arus global karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai nasional, sehingga mudah terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Berbagai perubahan diatas juga dapat terjadi akibat perubahan

dalam sistem sosial, politik, dan kenegaraan, yang menuntut kemantapan PKn untuk menjamin kelangsungan NKRI. Tuntutan menuju kehidupan lebih demokratis adalah hasil positif dari pendidikan PKn terbaru, meski juga menimbulkan tantangan bagi proses demokratisasi. Selain itu perspektif historis dari waktu ke waktu ternyata menghasilkan cerminan paradigme baru yang didasari keadaan politik dan kekuasaan, lalu kemudian secara signifikan mempengaruhi dan membentuk sistem pendidikan Indonesia selama ini.

Pembahasan

Perbandingan Paradigma Baru Pembelajaran PKn SD dengan Paradigma Lama

Pembahasan mendasar mengenai Misi PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, tujuan utamanya adalah membentuk tiga karakteristik utama warga negara yang demokratis: kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan partisipasi warga negara (*civic participation*). Menurut Buchori, Juneman dalam Kamaliah, L., Al Sadad, D., & AS, N. N, (2023) menyebutkan bahwa pentingnya perbandingan antara Paradigma Baru Pembelajaran PKn SD dengan Paradigma Lama Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 terletak pada cakupan pengetahuan PKn yang mencakup semua aspek kehidupan bernegara. Paradigma baru ini bertujuan menciptakan manusia berkarakter yang dinamis dalam kehidupan sehari-hari, serta mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakan dan interaksi sosial. Sehingga Tugas PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi dengan tiga fungsi utama: mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic knowledge*), membina keterampilan warga negara (*civic skills*), dan membentuk watak warga negara (*civic disposition*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan mencakup dimensi rasional, spiritual, emosional, dan sosial untuk membentuk warga negara yang baik secara komprehensif, sehingga paradigma baru PKn memiliki ciri multidimensional.

Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma lama dianggap tidak efektif sebagai sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya dapat membuat warga negara semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu, paradigma baru dalam pelajaran PKn nantinya akan menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, dan lain-lain, demi terciptanya stabilitas nasional sebagai dasar bagi kelangsungan pembangunan. Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis (Ar, 2004). Oleh sebab itu perwujudan paradigma baru tentang PKn harus benar-benar berjalan agar pembentukan masyarakat terutama pada tingkat sekolah dasar dapat berjalan semaksimal mungkin.

Integrasi pendidikan Karakter dalam pembelajaran PKn di era revolusi industri 4.0

Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di era Revolusi Industri 4.0 sangat penting untuk mengembangkan karakter siswa yang siap menghadapi tantangan global. Pada paradigma baru, kolaborasi antara Pendidikan Karakter dan Pancasila di era revolusi industri 4.0 menjadi aspek utama dalam membimbing setiap warga negara dalam menjalani kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Seperti yang kita ketahui selama ini, pembelajaran PKn cenderung bersifat verbalistik dan hanya berfokus pada penguasaan isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Izma & Kesuma, 2019).

Di era revolusi 4.0, generasi emas harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pada zamannya, seperti halnya melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas dan menghadapi gejolak yang tibul

mengenai perubahan demokrasi. Terutama di saat sekarang kecenderungan universal permasalahan PKn banyak sekali bersinggungan dengan perubahan masyarakat yang mengglobal yang berlangsung sangat cepat. Pada saat situasi pandemic kemarin, keterampilan teknis peserta didik dan secara langsung di sini melibatkan para guru menyangkut kompetensi instrumental/teknologi ketika mengakses internet. Aksesibilitas internet dan memanfaatkan teknologi digital menjadi syarat kunci keberhasilan pembelajaran daring" (Annisa & Dewi, 2022).

Pendidikan 4.0 hanya dapat diimplementasikan dengan merujuk pada paradigma baru pendidikan yang bercirikan peserta didik sebagai konektor, creator, dan konstruktivis dalam rangka produksi dan aplikasi pengetahuan serta inovasi Guru di era revolusi industri 4.0 perannya tak akan tergantikan oleh teknologi. Peran guru tak tergantikan karena guru adalah pembentuk karakter anak didik melalui pendidikan budi pekerti, toleransi, dan nilai kebaikan. Namun demikian, guru perlu mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan menarik. Demikian juga peran guru berubah dari sebagai penyampai pengetahuan kepada peserta didik, menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembang imajinasi, kreativitas nilai-nilai karakter, serta team work, dan empati sosial karena jika tidak maka peran guru dapat digantikan oleh teknologi. Guru di era Revolusi Industri 4.0 perlu memiliki lima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu: 1) Educational Competence 2) Competence for technological commercialization, 3) Competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid dan keunggulan memecahkan masalah (problem solver competence) 4) Competence in future strategies, dunia mudah berubah dan berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya. 5) Coun selor competence. (Kahar, et all. 2021).

Menurut (Pertiwi dkk., 2021) menuturkan bahwa Karakter terdiri dari tiga elemen yang saling berkaitan: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Karakter yang baik mencakup pemahaman tentang kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan, dan tindakan yang baik. Namun, esensinya pendidikan karakter memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar pendidikan moral dengan kata-kata. Lebih rinci Pertiwi dkk., (2021) juga menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membimbing perkembangan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat SD, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, dan membentuk pribadi yang selaras dengan pandangan hidup, ideologi, serta dasar negara kita, yaitu Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, para guru harus mengimplementasikan nilai-nilai PKn dalam proses pembelajaran secara efektif. Penerapan pembelajaran PKn yang baik di sekolah dasar juga sangat terkait dengan Pendidikan Karakter, yang menjadi dasar dalam membentuk moral dan etika siswa.

Benteng pemisah antara karakter dengan kehidupan di era revolusi industri 4.0 sering kali menjadi menjadi tantangan yang sulit untuk dibendung. Namn dibalik itu Penelitian Triyanto, (2020) menunjukkan bahwa era revolusi industri 4.0 memberikan kesempatan positif dalam menerapkan pendidikan karakter. Tantangan pendidik adalah bagaimana mengajarkan siswa untuk mengelola etika di era revolusi industri 4.0. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 meliputi menjaga keseimbangan, keselamatan dan keamanan online, *cyberbullying*, *sexting*, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme. Para pembuat kebijakan pendidikan perlu aktif terlibat dalam pengembangan pembelajaran karakter di era revolusi industri 4.0 yang berkelanjutan untuk memastikan penerapan pembelajaran digital yang efektif.

Berdasarkan unsur tersebut peran pengaruh PKn dapat dengan leluasa menjadi benteng terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa disekolah dasar. Tidak hanya berfokus pada karakter siswa saja, bagi seorang pendidik seharusnya menyadari bahwa Abad ke-21 memerlukan sistem pendidikan yang mendorong keterampilan dan kompetensi masa depan, termasuk kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Teknologi digital menyediakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk melengkapi, memperkaya, dan mengubah pendidikan demi menghadapi tantangan baru ini. Sebab, Penelitian Davis dalam Triyanto, (2020) menunjukkan bahwa memberikan akses internet kepada siswa saja tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Integrasi teknologi yang tepat diperlukan agar siswa dapat terlibat secara aktif dengan ide-ide, sehingga mereka benar-benar merasakan pengalaman belajar yang berkualitas. Ini adalah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh guru dalam pendidikan karakter. Sebagai peluang, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat berperan sebagai alat utama untuk memfasilitasi akses pendidikan yang adil dan inklusif, menjembatani kesenjangan pembelajaran, membuka perspektif baru bagi guru dan profesinya, meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran, serta meningkatkan administrasi pendidikan dan pemerintahan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh guru dan siswa seharusnya menghasilkan pembelajaran karakter secara digital yang mendorong dan mempromosikan pengembangan keterampilan penting abad ke-21, seperti komunikasi dan kolaborasi, serta meningkatkan prestasi dan motivasi siswa.

Maka integrasi teknologi dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media digital interaktif, dan aplikasi pendidikan berbasis internet menjadi alat penting dalam proses ini. Pendekatan yang menekankan kolaborasi, diskusi kritis, dan refleksi diri juga terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan etika. Sama halnya dengan mempromosikan hasil tugas kemedial sosial atau menggunakan platform digital lainnya seperti pembuatan video youtube untuk berbagi konten nasionalis, demokrasi dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Paradigma baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dan metode inovatif dalam pembelajaran PKn, yang mencakup integrasi teknologi, mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Metode seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media digital interaktif, dan aplikasi pendidikan berbasis internet efektif dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan etika digital. Dengan mengadopsi paradigma baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, pembelajaran PKn tidak hanya membentuk karakter siswa yang baik tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0.

Referensi

- Alinata, R., et al. (2024). Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)*, 2(1), 20-29.
- Anatasya, E., & Dewi, D. A. (2021). Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34133>
- Annisa, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Revolusi 4.0. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 47-57.

-
- Ar, M. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru dan implementasinya dalam kurikulum berbasis kompetensi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/civics.v1i1.5671>
- Budiutomo, T. W. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Academy of Education Journal*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.47200/aoej.v4i1.94>
- Fahrurrozi, F., Sari, Y., & Fadillah, J. (2022). Studi Literatur: Pemanfaatan Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran PKN Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2795>
- Faradia, S., & Safira Firdaus, D. (t.t.). Analisis Perkembangan Kurikulum Pembelajaran PPKn SD: Implementasi Kurikulum 1984-Kurikulum Merdeka. Diambil 1 Juni 2024, dari <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- Fauziah, A.Z. (2023). Implementasi Pembelajaran Pkn Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(1), 19-24. <https://doi.org/10.59632/edukasitematik.v4i1>
- Febrita, I., & Harni, H. (2020). Model Problem Based Learning dalam Pembelajaran Tematik Terpadu terhadap Berfikir Kritis Siswa di Kelas IV SD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1619–1633. <https://doi.org/10.31004/jptam.v4i2.627>
- Hartanto, D. (2023). Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal pada siswa-siswi SMA Al Ma'shum Kisaran. *Jurnal Sintaksis*, 5(1), 42–51. <https://doi.org/10.55263/sintaksis.v5i1.457>
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i1.2419>
- Juwandi, R. (2020). Penguatan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis Pembelajaran Daring Di Era Digital 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/9972>
- Kahar, M. I., et all. (2021). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(1), 58-78.
- Kamaliah, L., Al Sadad, D., & AS, N. N. (2023). Mampu Menguraikan Paradigma Baru Pembelajaran PKN Dengan Sikap Bertanggung Jawab dan Mandiri. *SNHRP*, 5, 1040-1052.
- Munawaroh, S.Z., & Dewi, D.A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal on Education*, 3(4), 291-298. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1565>
- Purwanti, A., & Haryanto, H. (2015). Pengembangan Motion Graphic Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas I Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/tp.v2i2.7609>

- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-15.
- Santoso, G., Muchtar, S. A., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis Swot Civic Education Curriculum For Senior High School Year 1975-2013. *Jurnal civicus*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/civicus.v15i1.2073>
- Septiana, T. S., & Kurniawan, M. R. (2018). Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 Pada Mata Pelajaran Pkn Di Sd Muhammadiyah Kauman Tahun 2016/2017. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.12928/fundadikdas.v1i1.74>
- Sunarso, S. (2009). Dinamika pendidikan kewarganegaraan di indonesia dari rezim ke rezim. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3784>
- Triyanto, T. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>